

MODEL KEPEMIMPINAN GEREJAWI YANG BERAKAR PADA NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL

Jhesica Patalo

Fakultas Kebudayaan dan Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri
Toraja, Indonesia

Correspondensi author email: jhesicapatalo3@gmail.com

Asildan Bungan Layuk

Fakultas Kebudayaan dan Kepemimpinan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri
Toraja, Indonesia

asildabungan1@gmail.com

Arya Arnal Anugrah

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

aryaanugrah950@gmail.com

Selfester Morna

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

selfestermorna7@gmail.com

Febriana Efrin

Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

febriantifebru207@gmail.com

Abstract

This article aims to examine a model of church leadership rooted in local cultural values as a contextual approach to addressing the challenges of ministry within Indonesia's multicultural society. This approach is based on the understanding that the church does not exist in a vacuum, but rather within a specific social and cultural context that shapes the way its members think, act, and believe. Using descriptive qualitative methods using interviews, participant observation, and literature review, this study found that cultural values such as deliberation, mutual cooperation, respect for traditional leaders, and traditional social structures have influenced the way leadership is exercised in local churches. Church leadership in this context has a dual function: as a spiritual and social figure, bridging the Christian faith with the realities of everyday life. However, the process of inculturating cultural values into church leadership is not without challenges, particularly in maintaining theological fidelity to biblical teachings without falling into syncretism. Therefore, church leadership development strategies must be directed toward contextual, collaborative development based on in-depth theological reflection. In this way, the church can realize leadership that is not only socially effective, but also spiritually faithful in answering the call to service in society.

Keywords: Church leadership, local culture, inculturation, contextualization, Indonesian church

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji model kepemimpinan gerejawi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal sebagai pendekatan kontekstual dalam menjawab tantangan pelayanan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Pendekatan ini dilandaskan pada pemahaman bahwa gereja tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan beriman umat. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh adat, serta struktur sosial tradisional telah memengaruhi cara kepemimpinan dijalankan di gereja-gereja lokal. Kepemimpinan gerejawi dalam konteks ini memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tokoh spiritual dan sosial, yang menjembatani iman Kristen dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian, proses inkulturasi nilai budaya ke dalam kepemimpinan gereja tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam menjaga kesetiaan teologis terhadap ajaran Alkitab tanpa terjebak dalam sinkretisme. Oleh karena itu, strategi pengembangan kepemimpinan gereja harus diarahkan pada pembinaan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis refleksi teologis yang mendalam. Dengan demikian, gereja dapat mewujudkan kepemimpinan yang bukan hanya efektif secara sosial, tetapi juga setia secara spiritual dalam menjawab panggilan pelayanan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kepemimpinan gerejawi, budaya lokal, inkulturasi, kontekstualisasi, gereja Indonesia

PENDAHULUAN

Kepemimpinan gerejawi di Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan kontekstual yang dihadapi umat Kristen di tengah pluralitas budaya. Dalam konteks ini, gereja dituntut tidak hanya menghadirkan spiritualitas yang kuat, tetapi juga mampu berakar pada budaya lokal tempat gereja itu tumbuh dan berkembang. Kepemimpinan yang mengabaikan nilai-nilai budaya setempat berpotensi menciptakan jarak antara gereja dan masyarakat, sehingga kehilangan relevansi sosial. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model kepemimpinan gerejawi yang kontekstual, yang mampu menyinergikan nilai-nilai Injili dengan kearifan lokal (Sumartana, 1994). Kontekstualisasi ini menjadi strategi penting dalam menjawab kebutuhan pastoral dan sosial jemaat secara lebih efektif. Gereja sebagai lembaga spiritual juga merupakan bagian dari struktur sosial yang tidak terlepas dari dinamika budaya. Maka, pemahaman budaya lokal menjadi keharusan dalam membentuk pola kepemimpinan yang relevan.

Model kepemimpinan gerejawi yang berakar pada budaya lokal bukanlah konsep baru, tetapi telah lama menjadi bagian dari praksis gereja-gereja lokal, terutama di

wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Toraja, dan Papua. Dalam konteks tersebut, pemimpin gereja tidak hanya berperan sebagai pengkhotbah atau pengajar, tetapi juga sebagai tokoh adat dan mediator dalam menyelesaikan konflik sosial (Bakara, 2017). Integrasi antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai Kristiani menciptakan model kepemimpinan yang bersifat holistik, melampaui sekadar fungsi liturgis atau administratif. Hal ini menunjukkan bahwa gereja yang hidup di tengah masyarakat multikultural harus mampu merangkul dan menghidupi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan substansi teologisnya. Dengan demikian, kepemimpinan gerejawi yang kontekstual adalah sebuah keniscayaan dalam pelayanan gereja masa kini.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang menghargai budaya lokal lebih mudah diterima oleh jemaat, karena pemimpin dianggap memahami kehidupan, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Menurut Situmorang (2013), proses inkulturasi nilai-nilai budaya dalam gereja membuka ruang dialog antara iman dan budaya, yang kemudian menghasilkan bentuk pelayanan yang lebih membumi. Dalam kepemimpinan seperti ini, seorang pendeta atau pemimpin jemaat harus memiliki kompetensi budaya selain kompetensi teologis. Kemampuan ini memungkinkan pemimpin gereja untuk menjembatani iman Kristen dengan cara hidup masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan harmoni dalam kehidupan berjemaat. Budaya lokal bukan hanya konteks pelayanan, tetapi juga sumber inspirasi moral dan spiritual yang memperkaya kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, gereja perlu menyusun kerangka kepemimpinan yang secara sadar menggali dan menghidupi nilai-nilai budaya yang positif.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua gereja berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam model kepemimpinan mereka. Beberapa gereja masih mengadopsi model kepemimpinan Barat yang hierarkis dan kurang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pemimpin gereja dan jemaat, terutama di daerah pedesaan atau komunitas adat yang memiliki struktur sosial dan sistem nilai tersendiri (Sumakul, 2005). Model kepemimpinan yang tidak kontekstual cenderung dianggap asing dan kaku oleh masyarakat lokal, yang menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan terhadap institusi gereja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap model kepemimpinan yang digunakan di berbagai gereja lokal sangat penting untuk menjamin efektivitas pelayanan. Kepemimpinan gerejawi yang sensitif terhadap budaya akan memungkinkan gereja untuk menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan di tengah masyarakat yang terus berubah.

Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat Toraja, kepemimpinan gereja banyak dipengaruhi oleh struktur sosial adat yang berjenjang dan berwibawa. Pemimpin gereja sering kali juga berperan sebagai tokoh adat yang dihormati dalam berbagai upacara budaya (Tangdilintin, 1984). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan gereja tidak bisa dilepaskan dari fungsi sosialnya dalam masyarakat. Ketika gereja mampu mengintegrasikan fungsi religius dan kultural secara harmonis, maka pelayanan yang

dihadirkan menjadi lebih kuat dan menyatu dengan realitas kehidupan umat. Model semacam ini juga mencerminkan semangat inkulturasi yang menempatkan budaya lokal bukan sebagai penghalang Injil, tetapi sebagai lahan subur bagi pewartaan dan pelayanan gereja. Oleh karena itu, pengembangan model kepemimpinan berbasis budaya lokal tidak hanya penting secara strategis, tetapi juga merupakan bentuk kesetiaan terhadap amanat inkarnasi Kristus dalam konteks manusia.

Dalam kerangka teologis, model kepemimpinan seperti ini dapat dipahami sebagai perwujudan dari prinsip inkarnasi, di mana Firman menjadi manusia dan hidup di antara manusia (Yohanes 1:14). Pemimpin gereja dipanggil untuk hidup dan melayani dalam konteks budaya yang nyata, bukan dalam ruang teologis yang abstrak. Pemahaman terhadap budaya bukan sekadar aspek tambahan, melainkan bagian integral dari spiritualitas kepemimpinan itu sendiri (Sumartana, 1994). Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya bersifat fungsional, tetapi juga spiritual, karena mencerminkan kesediaan pemimpin gereja untuk berakar dan hadir secara otentik di tengah umatnya. Kepemimpinan seperti ini adalah bentuk pelayanan yang menyentuh, membumi, dan membebaskan. Maka, dalam semangat pelayanan yang transformatif, gereja harus membentuk pemimpin-pemimpin yang memahami konteks budaya mereka secara mendalam dan reflektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan model kepemimpinan gerejawi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya ingin menampilkan praktik-praktik terbaik dari beberapa konteks gereja lokal, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis yang dapat menjadi rujukan bagi gereja-gereja lain dalam membangun kepemimpinan yang kontekstual. Melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal dan praktik kepemimpinan yang ada, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan teologi kontekstual dan praksis gereja di Indonesia. Dengan demikian, gereja akan semakin mampu menjalankan misinya secara efektif dalam membentuk umat yang setia, relevan, dan berakar pada tanah tempat mereka berpijak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam model kepemimpinan gerejawi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal di beberapa komunitas Kristen di Indonesia. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami realitas sosial dan budaya yang kompleks dalam konteks kepemimpinan gereja secara kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap gereja-gereja lokal yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam struktur dan praktik kepemimpinannya. Informan penelitian terdiri dari para pemimpin gereja, tokoh adat, dan anggota jemaat yang dianggap memahami dinamika

kepemimpinan dalam konteks budaya lokal. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan menggunakan pendekatan interpretatif-hermeneutik untuk menangkap makna di balik praktik kepemimpinan yang muncul. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang hasil temuan kepada informan (member check). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghadirkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang model kepemimpinan gerejawi yang kontekstual dan berakar pada budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Struktur Kepemimpinan Gereja

Kepemimpinan gerejawi dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya lokal memberikan warna tersendiri dalam praktik kepemimpinan gereja di berbagai daerah. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap pemimpin tua atau tokoh adat, dan prinsip kekeluargaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur sosial komunitas lokal (Koentjaraningrat, 2009). Ketika gereja hadir dalam konteks tersebut, maka struktur kepemimpinan yang diadopsi pun tak jarang menginternalisasi nilai-nilai budaya tersebut sebagai strategi pastoral dan sosial. Proses ini bukan sekadar adaptasi administratif, melainkan bentuk inkulturasi yang mencerminkan teologi yang membumi dan kontekstual (Sumartana, 1994). Integrasi nilai budaya ke dalam struktur gereja memungkinkan terbentuknya kepemimpinan yang lebih diterima oleh jemaat serta lebih efektif dalam menjalankan tugas pengembalaan.

Salah satu bentuk integrasi yang paling nyata terlihat dalam model musyawarah gereja yang menyerupai sistem rembug adat atau rapat kampung di berbagai suku. Banyak gereja lokal, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat adat seperti di Toraja, Nias, dan Timor, mengadopsi mekanisme pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, bukan otoritas tunggal (Tangdilintin, 1984). Dalam praktiknya, keputusan strategis gereja diambil bukan hanya oleh pendeta atau majelis gereja secara sepihak, tetapi melalui forum bersama yang melibatkan tokoh adat dan perwakilan jemaat. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif berbasis budaya yang menempatkan kebersamaan di atas dominasi individu. Melalui pendekatan ini, gereja tidak hanya menghidupi nilai-nilai kekristenan tetapi juga menghormati dan memberdayakan struktur sosial lokal yang sudah mengakar. Pendekatan ini juga menghindarkan gereja dari praktik otoritarianisme spiritual yang seringkali muncul dalam struktur yang kaku dan tidak kontekstual.

Selain mekanisme musyawarah, struktur kepemimpinan gereja di banyak komunitas lokal juga mengadopsi sistem hierarki sosial masyarakat adat. Misalnya, dalam masyarakat Toraja, struktur kepemimpinan gereja sering mencerminkan struktur sosial yang bersifat stratifikatif, di mana tokoh masyarakat atau keluarga bangsawan

lebih banyak berperan dalam pengambilan keputusan gereja (Tangdilintin, 1984). Meskipun secara teologis gereja menjunjung kesetaraan di hadapan Allah, dalam konteks sosial-budaya peran tokoh adat tetap diberi tempat istimewa sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan budaya setempat. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membentuk elitisasi dalam gereja, tetapi sebagai bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal yang telah terbukti menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, kepemimpinan gereja menjadi refleksi dari dialog antara nilai-nilai Injil dan struktur sosial budaya yang ada.

Prinsip gotong royong juga menjadi nilai budaya yang kuat dalam membentuk pola kepemimpinan gereja yang kolektif dan partisipatif. Dalam konteks ini, pemimpin gereja tidak hanya menjadi pengarah spiritual tetapi juga penggerak komunitas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan seperti pembangunan gereja, pelayanan diakonia, dan program pemberdayaan jemaat sering dilakukan dalam semangat gotong royong yang mencerminkan solidaritas komunitas (Sutrisno & Hendar, 2011). Kepemimpinan yang membangun partisipasi aktif jemaat berdasarkan nilai gotong royong menjadikan gereja lebih dari sekadar lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial yang hidup. Model kepemimpinan ini juga memperkuat kohesi sosial di antara anggota jemaat dan memperluas fungsi gereja sebagai agen transformasi masyarakat.

Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kepemimpinan gereja juga terlihat dalam bahasa komunikasi dan simbol-simbol liturgis yang digunakan dalam pelayanan. Pemimpin gereja yang memahami bahasa lokal dan mampu berkomunikasi menggunakan idiom budaya setempat cenderung lebih diterima oleh jemaat. Penggunaan simbol-simbol adat, seperti pakaian tradisional dalam ibadah tertentu, juga merupakan bentuk pengakuan terhadap budaya lokal sebagai sarana ekspresi iman (Situmorang, 2013). Liturgi yang mencerminkan budaya lokal tidak hanya memperkuat identitas jemaat tetapi juga menciptakan ruang spiritual yang lebih otentik dan kontekstual. Kepemimpinan gereja yang terbuka terhadap ekspresi budaya lokal ini mencerminkan pendekatan inkulturatif yang menjadikan budaya sebagai mitra dialog dalam kehidupan bergereja.

Namun, integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kepemimpinan gereja bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang diadopsi tidak bertentangan dengan prinsip dasar kekristenan. Misalnya, praktik budaya yang mengandung unsur diskriminasi gender atau kekerasan simbolik tidak boleh dijadikan dasar dalam struktur gereja. Oleh karena itu, proses integrasi harus dilakukan dengan selektif dan kritis, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Injil yang mengedepankan kasih, keadilan, dan kesetaraan (Sumakul, 2005). Gereja harus terus menerapkan discernment teologis untuk membedakan mana nilai budaya yang dapat dikristenkan dan mana yang perlu dikoreksi. Dalam hal ini, pendidikan teologi

kontekstual menjadi penting untuk membekali pemimpin gereja agar mampu bersikap bijak dan reflektif dalam menghadapi dinamika budaya setempat.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam struktur kepemimpinan gereja merupakan langkah strategis dan teologis yang penting dalam membangun gereja yang relevan dan kontekstual di Indonesia. Kepemimpinan gerejawi yang tidak hanya berakar pada Alkitab tetapi juga menghormati kearifan lokal akan lebih mampu menyentuh kehidupan umat dan menjawab kebutuhan nyata mereka. Proses ini sekaligus menjadi wujud nyata dari inkarnasi Kristus yang hadir dalam konteks kehidupan manusia secara konkret. Gereja yang demikian akan menjadi terang dan garam yang tidak terpisah dari masyarakat, melainkan menyatu dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Oleh karena itu, pengembangan model kepemimpinan gereja di Indonesia perlu terus mendorong dialog kreatif antara iman dan budaya lokal. Dalam semangat inilah, gereja dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup di tengah dunia nyata dengan segala kompleksitas dan kekayaan budayanya.

Kepemimpinan sebagai Representasi Ganda: Tokoh Spiritual dan Sosial

Dalam konteks budaya lokal di Indonesia, pemimpin gereja tidak hanya menjalankan fungsi spiritual semata, melainkan juga memainkan peran signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Posisi pemimpin gereja, seperti pendeta atau majelis, seringkali dipandang sebagai figur sentral yang menjadi rujukan tidak hanya dalam hal-hal keagamaan, tetapi juga dalam urusan adat, sosial, dan bahkan politik komunitas. Dalam banyak komunitas Kristen di daerah seperti Toraja, Nias, Minahasa, dan Maluku, kehadiran pemimpin gereja menjadi simbol ganda: mewakili otoritas spiritual sebagai pelayan Firman Tuhan, dan sekaligus sebagai pemimpin sosial yang mengatur atau menengahi relasi antarwarga (Tangdilintin, 1984). Kedudukan ganda ini muncul karena gereja telah menyatu dalam kehidupan masyarakat sejak masa misi kolonial dan terus berkembang dalam struktur sosial lokal.

Peran pemimpin gereja sebagai tokoh sosial terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan di luar gereja, seperti mediasi konflik, penyelesaian sengketa adat, pengelolaan bantuan sosial, hingga keterlibatan dalam musyawarah kampung atau desa. Pemimpin gereja dipercaya memiliki hikmat dan keadilan karena dianggap lebih netral dan bermoral tinggi. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih datang kepada pendeta sebelum pergi ke kepala desa atau aparat hukum karena mereka meyakini keputusan yang diambil pemimpin gereja didasari oleh kasih dan pertimbangan etis (Situmorang, 2013). Hal ini memperlihatkan bahwa spiritualitas kepemimpinan dalam konteks budaya lokal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan aktif dalam ranah sosial. Dengan demikian, gereja dan pemimpinnya menjadi pusat otoritas moral dan sosial yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari umat.

Peran ganda ini juga menjadikan pemimpin gereja sebagai jembatan antara norma-norma religius dan norma-norma adat. Misalnya, dalam masyarakat adat

tertentu, ritual adat yang melibatkan komunitas sering dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemimpin gereja untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Kristen. Ini mencerminkan proses inkulturasi yang aktif dan reflektif, di mana pemimpin gereja memainkan peran strategis dalam menyaring, mengadaptasi, dan menegosiasikan nilai-nilai budaya dengan teologi Kristen (Sumartana, 1994). Kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi ganda ini adalah kepemimpinan yang kontekstual dan adaptif, tidak hanya mengabarkan Injil secara verbal tetapi juga menerjemahkannya dalam konteks budaya lokal yang hidup. Dalam hal ini, pemimpin gereja menjadi aktor kultural yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan menyuarakan kehendak Allah dalam bahasa budaya setempat.

Dari sisi gerejawi, fungsi ganda ini memberi implikasi pada beban dan tanggung jawab yang lebih besar bagi seorang pemimpin. Ia harus mampu menjaga integritas moral dan spiritual, sekaligus memiliki kecakapan sosial dan kepemimpinan publik. Tidak sedikit pendeta atau tokoh gereja yang juga menjadi penggerak pembangunan, fasilitator ekonomi jemaat, atau pemrakarsa inisiatif sosial yang memberdayakan komunitas. Dalam banyak laporan gereja lokal, keberhasilan program pemberdayaan jemaat, seperti koperasi gereja, pelatihan kerja, hingga advokasi hak-hak adat, tidak lepas dari peran aktif pemimpin gereja (Bakara, 2017). Oleh karena itu, pendidikan teologi dan pembinaan kepemimpinan gereja di Indonesia perlu memberi perhatian serius pada pengembangan kapasitas sosial dan kepemimpinan kontekstual, bukan hanya pada aspek spiritual dan liturgis semata.

Namun demikian, peran ganda pemimpin gereja ini tidak terlepas dari tantangan dan dilema etis. Pemimpin gereja berisiko terseret dalam konflik kepentingan ketika menjalankan fungsi sosial yang menyentuh ranah kekuasaan, politik lokal, atau pertarungan sumber daya. Dalam konteks demikian, pemimpin gereja harus mampu menjaga netralitas, tidak memihak kelompok tertentu, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang bersumber dari ajaran Injil. Ini membutuhkan integritas pribadi dan spiritualitas yang matang agar kepemimpinan tidak kehilangan otoritas moralnya di mata jemaat dan masyarakat (Sumakul, 2005). Selain itu, beban kerja yang tinggi dan ekspektasi publik yang besar terhadap pemimpin gereja sering kali menimbulkan tekanan psikologis dan kelelahan emosional yang tidak ringan. Gereja sebagai institusi perlu memberikan dukungan struktural dan pastoral yang memadai bagi para pemimpin yang menjalankan peran ganda ini.

Di sisi lain, fungsi ganda tersebut juga membuka peluang besar bagi gereja untuk menjadi agen transformasi sosial yang efektif. Ketika pemimpin gereja mampu menjalankan kedua peran ini secara seimbang dan kontekstual, maka gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan moral, penguatan budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi gereja sebagai pusat komunitas mendapatkan penguatan melalui kepemimpinan yang peduli, aktif, dan mampu mengintegrasikan iman dengan realitas sosial. Dalam konteks ini, gereja bisa menjadi

model etika sosial Kristen yang menghidupi nilai kasih, keadilan, dan pengharapan di tengah masyarakat majemuk dan penuh tantangan. Kepemimpinan gereja yang mampu menjembatani dimensi spiritual dan sosial merupakan bentuk pelayanan yang utuh dan transformatif.

Dengan demikian, kepemimpinan gereja sebagai representasi ganda merupakan refleksi dari misi gereja yang tidak hanya berfokus pada liturgi atau sakramen, tetapi juga pada panggilan untuk terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat secara nyata. Model kepemimpinan ini relevan dalam konteks Indonesia yang sarat dengan kekayaan budaya dan kompleksitas sosial. Gereja dan pemimpinnya diharapkan terus mengembangkan sensitivitas sosial dan kearifan budaya agar pelayanan yang dilakukan semakin kontekstual dan membumi. Dalam semangat inkarnasi, pemimpin gereja diharapkan menjadi figur yang hadir, menyatu, dan membawa damai di tengah masyarakat. Kehadiran mereka bukan hanya dalam mimbar, tetapi juga di pasar, ladang, balai desa, dan ruang-ruang dialog budaya. Inilah kepemimpinan yang tidak hanya menuntun umat menuju surga, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kehidupan yang bermartabat di bumi.

Tantangan Inkulturasi: Antara Kesetiaan Teologis dan Adaptasi Budaya

Inkulturasi merupakan proses dialog antara Injil dan budaya lokal yang bertujuan untuk menjadikan kekristenan semakin membumi dalam kehidupan umat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, proses inkulturasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pesan Injil dapat diterima dan dipahami secara kontekstual oleh masyarakat. Namun demikian, proses ini bukan tanpa tantangan. Salah satu persoalan mendasar adalah menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran teologis Kristen yang universal dan upaya adaptasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang spesifik dan terkadang kompleks. Jika tidak dilakukan dengan bijaksana, proses inkulturasi bisa tergelincir ke dalam sinkretisme, yakni pencampuran yang tidak sehat antara iman Kristen dan unsur kepercayaan lokal yang bertentangan dengan Alkitab (Sumakul, 2005). Tantangan ini mengharuskan gereja untuk mengembangkan sikap reflektif dan teologis yang matang.

Beberapa praktik budaya lokal yang kaya akan simbolisme religius dan ritual tradisional sering kali menjadi dilema dalam proses inkulturasi. Misalnya, dalam budaya Toraja, upacara pemakaman (Rambu Solo') sarat dengan makna sosial dan spiritual, namun juga mengandung elemen animisme yang tidak sejalan dengan teologi Kristen (Tangdilintin, 1984). Hal ini menuntut pemimpin gereja untuk memiliki kemampuan dalam memilah elemen budaya mana yang dapat diadopsi sebagai ekspresi iman Kristen, dan mana yang harus ditinggalkan atau dimodifikasi. Tantangan tersebut menjadi lebih besar ketika jemaat memegang erat tradisi sebagai identitas sosial, sehingga penolakan terhadap unsur budaya tertentu dapat dianggap sebagai ancaman terhadap warisan leluhur. Oleh karena itu, proses inkulturasi harus berlangsung melalui

pendekatan pastoral yang empatik dan edukatif, bukan sekadar pelarangan yang bersifat legalistik.

Selain itu, tantangan inkulturasi juga muncul dalam bentuk tekanan terhadap kesatuan gereja. Dalam upaya mengadopsi budaya lokal, gereja-gereja di Indonesia kadang menghasilkan praktik yang sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan antara satu denominasi dengan denominasi lainnya. Keragaman ini dapat memperkaya wajah gereja secara keseluruhan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kebingungan atau perpecahan apabila tidak ada prinsip-prinsip teologis dasar yang menjadi acuan bersama (Situmorang, 2013). Dalam hal ini, penting untuk menegaskan bahwa inkulturasi bukan berarti relativisasi iman, tetapi penjabaran iman dalam konteks budaya secara dinamis. Kesatuan gereja harus tetap dijaga melalui kesetiaan pada kebenaran Injil, sembari membuka ruang bagi keberagaman bentuk ekspresi budaya yang sah dan bermartabat.

Kesetiaan teologis dalam proses inkulturasi menuntut pemimpin gereja untuk memiliki pengetahuan teologis yang mendalam, agar tidak terjebak pada kompromi nilai yang melemahkan integritas Injil. Inkulturasi harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang inti ajaran Kristen, terutama tentang Kristologi, keselamatan, dan otoritas Alkitab. Dengan demikian, budaya tidak dijadikan tolok ukur kebenaran iman, melainkan sebagai media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan Injil (Sumartana, 1994). Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika gereja terlalu cepat mengadopsi elemen budaya tertentu hanya demi keterlibatan masyarakat, tanpa melakukan kajian teologis dan refleksi pastoral yang memadai. Inkulturasi yang tergesa-gesa atau bersifat pragmatis justru dapat merusak esensi iman Kristen yang hendak diwartakan.

Di sisi lain, penolakan total terhadap budaya lokal juga merupakan bentuk kegagalan dalam memahami misi inkarnatif Kristus. Tuhan hadir dalam sejarah dan budaya manusia, dan karena itu Injil tidak pernah lepas dari konteks budaya. Menolak seluruh unsur budaya dengan alasan menjaga kemurnian teologis bisa berujung pada alienasi gereja dari masyarakat tempat ia melayani. Pendekatan yang terlalu eksklusif dan dogmatis dapat menyebabkan gereja terasing dan kehilangan relevansi sosial. Oleh karena itu, diperlukan spiritualitas dialogis yang mengakui adanya benih-benih kebenaran dalam budaya (*semina verbi*), yang dapat menjadi titik temu antara iman Kristen dan kearifan lokal (Bakara, 2017). Pemimpin gereja harus bersikap terbuka namun kritis, dan membangun dialog yang jujur antara iman dan budaya demi membentuk pelayanan yang transformatif.

Tantangan lainnya terletak pada kurikulum pendidikan teologi yang masih banyak bersifat Barat-sentris dan belum sepenuhnya kontekstual. Banyak lembaga teologi di Indonesia masih mengajarkan model kepemimpinan dan pelayanan yang kurang memperhatikan dimensi budaya lokal. Akibatnya, lulusan sekolah teologi sering mengalami kesenjangan ketika terjun langsung ke medan pelayanan yang sarat dengan

simbol dan praktik budaya lokal yang tidak mereka pahami secara teologis maupun antropologis. Oleh karena itu, pendidikan teologi perlu diarahkan untuk membekali calon pemimpin gereja dengan pengetahuan lintas budaya, metode refleksi kontekstual, dan kemampuan dialog interkultural (Sutrisno & Hendar, 2011). Dengan begitu, pemimpin gereja akan lebih siap menghadapi realitas pastoral yang menuntut pemahaman terhadap kompleksitas inkulturasi.

Akhirnya, tantangan inkulturasi bukanlah hambatan yang harus dihindari, tetapi peluang untuk menghidupi iman Kristen secara lebih mendalam dan kontekstual. Proses ini menuntut integritas spiritual, kebijaksanaan pastoral, serta refleksi teologis yang terus-menerus agar tidak terjebak pada ekstrem sinkretisme maupun fundamentalisme. Inkulturasi yang berhasil akan menampilkan wajah gereja yang berakar di tanahnya, menyuarakan Injil dalam bahasa dan simbol yang dipahami umat, dan tetap setia pada panggilan teologisnya. Gereja di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi teladan inkulturasi yang kreatif, reflektif, dan membebaskan, jika mampu menjawab tantangan ini dengan semangat dialog, kasih, dan tanggung jawab. Dalam proses ini, pemimpin gereja memegang peran strategis untuk menuntun umat menuju iman yang kontekstual, namun tetap teguh dalam kebenaran Kristus.

Strategi Pengembangan Kepemimpinan Gereja Kontekstual

Pengembangan kepemimpinan gereja yang kontekstual menjadi kebutuhan mendesak di tengah realitas keberagaman budaya di Indonesia. Gereja tidak dapat mengabaikan konteks sosial dan budaya tempat ia hadir, karena pelayanan gerejawi yang efektif haruslah bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan umat. Oleh karena itu, strategi pengembangan kepemimpinan gereja harus diarahkan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu menafsirkan Injil dalam kerangka budaya lokal yang hidup. Dalam konteks ini, kepemimpinan kontekstual tidak hanya mencakup kemampuan teologis, tetapi juga mencakup pemahaman antropologis, historis, dan sosiologis terhadap masyarakat yang dilayani (Sumakul, 2005). Strategi pengembangan ini menuntut perubahan paradigma dari model kepemimpinan gereja yang kaku dan institusional ke arah kepemimpinan yang reflektif, dialogis, dan partisipatif.

Salah satu strategi penting adalah mereformasi kurikulum pendidikan teologi agar lebih kontekstual dan berbasis budaya lokal. Lembaga-lembaga pendidikan teologi di Indonesia perlu memperkuat mata kuliah yang mengintegrasikan antara studi Alkitab dan pemahaman budaya lokal, seperti teologi kontekstual, antropologi budaya, dan pastoral inkulturatif. Dengan pembelajaran yang berbasis konteks, calon pemimpin gereja dapat lebih siap menghadapi tantangan lapangan yang menuntut fleksibilitas dan kepekaan budaya (Situmorang, 2013). Selain itu, pelatihan lapangan di wilayah pelayanan yang kaya dengan tradisi lokal dapat memperkaya pengalaman mahasiswa teologi dan memperluas perspektif mereka tentang pelayanan yang membumi. Dengan

cara ini, proses pendidikan teologi tidak hanya menjadi proses akademik, tetapi juga proses transformasi sosial dan spiritual.

Strategi berikutnya adalah mendorong gereja lokal untuk mengembangkan model kepemimpinan partisipatif yang berbasis komunitas. Kepemimpinan semacam ini memberi ruang kepada jemaat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, pelayanan sosial, dan pengembangan program gereja. Model ini sangat sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal Indonesia yang menjunjung tinggi semangat musyawarah, gotong royong, dan kolektivitas (Koentjaraningrat, 2009). Pemimpin gereja tidak lagi dipandang sebagai tokoh tunggal yang memonopoli otoritas rohani, tetapi sebagai fasilitator, penggerak, dan pelayan komunitas. Strategi ini tidak hanya membangun kepercayaan umat, tetapi juga memperkuat kapasitas kolektif gereja dalam menjawab tantangan sosial secara kontekstual. Gereja pun menjadi ruang pertumbuhan bersama yang mendorong partisipasi aktif seluruh anggota jemaat.

Selain reformasi kurikulum dan model partisipatif, gereja juga perlu mengembangkan strategi pelatihan berkelanjutan (*continuous formation*) bagi para pemimpin yang sudah aktif melayani. Banyak pemimpin gereja yang melayani di daerah terpencil atau komunitas adat belum mendapatkan akses pelatihan kepemimpinan kontekstual yang memadai. Oleh karena itu, gereja perlu mengadakan lokakarya, seminar, atau pelatihan rutin yang fokus pada pembacaan konteks lokal, resolusi konflik berbasis budaya, dan pelayanan pastoral yang relevan secara sosial (Sutrisno & Hendar, 2011). Pendekatan ini tidak hanya memperbarui wawasan para pemimpin gereja, tetapi juga memperkuat jaringan antar pemimpin gereja dari berbagai latar budaya. Dengan pelatihan berkelanjutan, kepemimpinan gereja menjadi lebih dinamis, tidak statis, dan terbuka terhadap pembelajaran sepanjang hayat.

Strategi penting lainnya adalah membangun kolaborasi antara gereja dan tokoh-tokoh adat setempat. Dalam banyak komunitas, tokoh adat memiliki otoritas sosial yang kuat dan dihormati. Mengabaikan mereka dalam pelayanan gereja akan berisiko menciptakan ketegangan atau penolakan. Sebaliknya, menjalin hubungan kemitraan dengan mereka dapat membuka peluang pelayanan yang lebih luas dan efektif. Pemimpin gereja dapat belajar banyak dari kearifan lokal yang dimiliki tokoh adat, dan sebaliknya dapat memberikan perspektif etis dan spiritual dalam kehidupan sosial masyarakat (Tangdilintin, 1984). Kolaborasi ini mencerminkan bahwa kepemimpinan gereja tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan terbuka terhadap realitas lokal yang ada. Dalam semangat dialog, gereja dan budaya lokal dapat saling memperkaya dan memperkuat.

Gereja juga perlu menciptakan ruang-ruang refleksi dan evaluasi terhadap praktik kepemimpinan yang sedang dijalankan. Banyak gereja belum memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas kepemimpinan mereka dalam konteks budaya lokal. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan gereja benar-benar menyentuh kebutuhan umat dan selaras dengan dinamika sosial yang

berkembang. Melibatkan jemaat dalam proses evaluasi juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan dan pelibatan umat. Dengan refleksi yang jujur dan terbuka, gereja dapat mengidentifikasi aspek-aspek kepemimpinan yang perlu diperbaiki serta mengembangkan inovasi pelayanan yang lebih kontekstual (Bakara, 2017). Ini menegaskan bahwa kepemimpinan kontekstual bukan sekadar teori, tetapi sebuah proses dinamis yang terus menerus diperbarui sesuai dengan perubahan zaman.

Akhirnya, strategi pengembangan kepemimpinan gereja kontekstual harus dilandasi oleh spiritualitas inkarnatif. Seorang pemimpin gereja yang kontekstual adalah ia yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan umatnya—menjadi bagian dari pergumulan, harapan, dan budaya mereka. Kepemimpinan yang inkarnatif ini memungkinkan gereja menjadi saksi Kristus yang hidup dan relevan di tengah dunia. Oleh karena itu, strategi apapun yang dirancang harus bertolak dari semangat pelayanan yang membumi, rendah hati, dan transformatif. Dalam masyarakat yang terus berubah, gereja harus menjadi komunitas yang adaptif, kreatif, dan setia pada Injil. Pengembangan kepemimpinan yang kontekstual bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan teologi atau sinode, tetapi merupakan tugas bersama seluruh tubuh Kristus di Indonesia.

KESIMPULAN

Model kepemimpinan gerejawi yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal merupakan respons strategis dan teologis terhadap tantangan pelayanan di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Kepemimpinan yang demikian tidak hanya menjadikan gereja relevan dalam konteks sosialnya, tetapi juga memungkinkan terjadinya dialog yang sehat antara iman dan budaya. Nilai-nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap tokoh adat, serta struktur sosial lokal telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk pola kepemimpinan gereja yang partisipatif, kolektif, dan kontekstual. Dengan mengadopsi pendekatan ini, gereja tidak kehilangan identitas teologisnya, melainkan semakin memperkuat kehadirannya sebagai tubuh Kristus yang hidup di tengah realitas umat. Peran ganda pemimpin gereja sebagai tokoh spiritual sekaligus sosial memperluas cakupan pelayanannya hingga ke ruang-ruang sosial kemasyarakatan. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan gereja bukan hanya soal pengajaran iman, tetapi juga tentang menjadi agen perubahan, penengah sosial, dan penggerak budaya yang adil dan bermartabat. Namun demikian, proses integrasi ini bukan tanpa tantangan. Inkulturasi yang tidak dilakukan secara kritis dapat berisiko mencampuradukkan ajaran Kristen dengan nilai-nilai budaya yang bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kesetiaan teologis terhadap Injil dan keterbukaan terhadap kearifan lokal yang dapat memperkaya pelayanan gereja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan kepemimpinan gereja harus diarahkan pada pembinaan yang kontekstual, baik melalui pendidikan teologi yang relevan maupun melalui pelatihan lapangan yang mengedepankan

pemahaman budaya. Gereja juga perlu mengembangkan model kepemimpinan yang reflektif dan partisipatif, melibatkan umat dan tokoh adat sebagai mitra pelayanan, serta terus mengevaluasi praktik kepemimpinan yang dijalankan. Dengan demikian, gereja akan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya menguasai teologi, tetapi juga memiliki kepekaan budaya dan sosial yang tinggi. Kesimpulannya, kepemimpinan gereja yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal bukanlah kompromi terhadap kebenaran iman, tetapi justru merupakan bentuk nyata dari inkarnasi kasih Allah dalam konteks budaya manusia. Model ini menjadi cermin dari gereja yang tidak eksklusif, tetapi inklusif dan relevan. Dalam realitas Indonesia yang kaya akan kearifan lokal, gereja memiliki peluang besar untuk menjadi komunitas yang menyatu dengan kehidupan masyarakat tanpa kehilangan arah spiritualnya. Oleh karena itu, gereja perlu terus mengembangkan strategi kepemimpinan yang dinamis, kreatif, dan kontekstual demi mewujudkan pelayanan yang menyeluruh, membumi, dan membebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakara, B. (2017). *Kepemimpinan Gereja dan Budaya Lokal di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Situmorang, R. (2013). *Inkulturasasi dan Tantangan Kontekstualisasi Iman di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumakul, J. (2005). *Menjadi Gereja Kontekstual di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sumartana, T. (1994). *Kristen dan Kebudayaan Jawa: Pergumulan di Antara Tradisi dan Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, E., & Hendar, E. (2011). *Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tangdilintin, E. (1984). *Kebudayaan dan Agama dalam Masyarakat Toraja*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.